

# **BAB I**

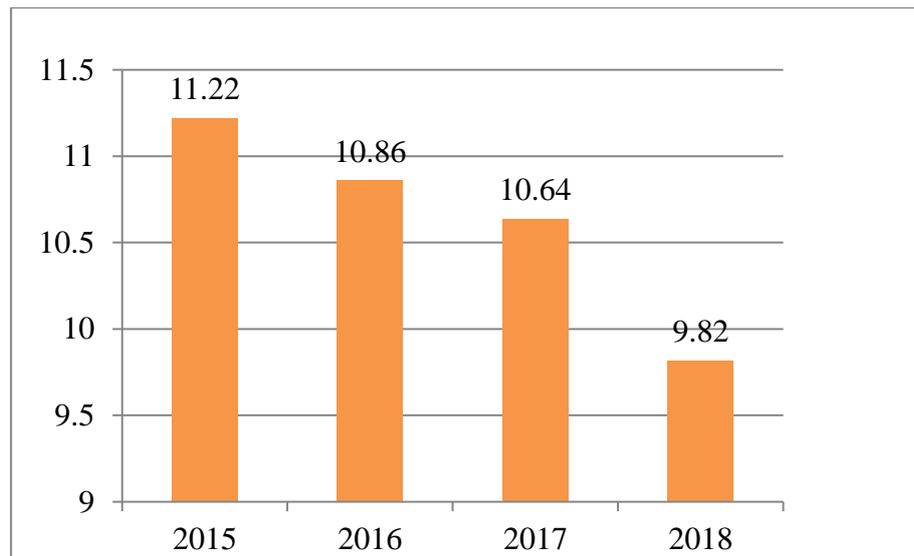
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang selalu dihadapi setiap negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia masih belum bisa menurunkan angka kemiskinan dalam waktu dekat, hal tersebut disebabkan oleh kinerja penurunan kemiskinan yang kurang menggembirakan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut BPS kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin diartikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Laju penurunan kemiskinan berjalan lambat selama empat tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin sebesar 28,59 juta atau 11,22% pada maret 2015 menjadi 28,01 juta atau 10,86% pada maret 2016 kemudian pada maret 2017 jumlah penduduk miskin menjadi 27,77 juta atau 10,64% dan pada maret 2018 tercatat jumlah penduduk miskin sebesar 25,95 juta atau 9,82% dari total jumlah penduduk Indonesia. Itu artinya selama empat tahun tersebut hanya berhasil menurunkan persentase kemiskinan sebanyak 1,4%.



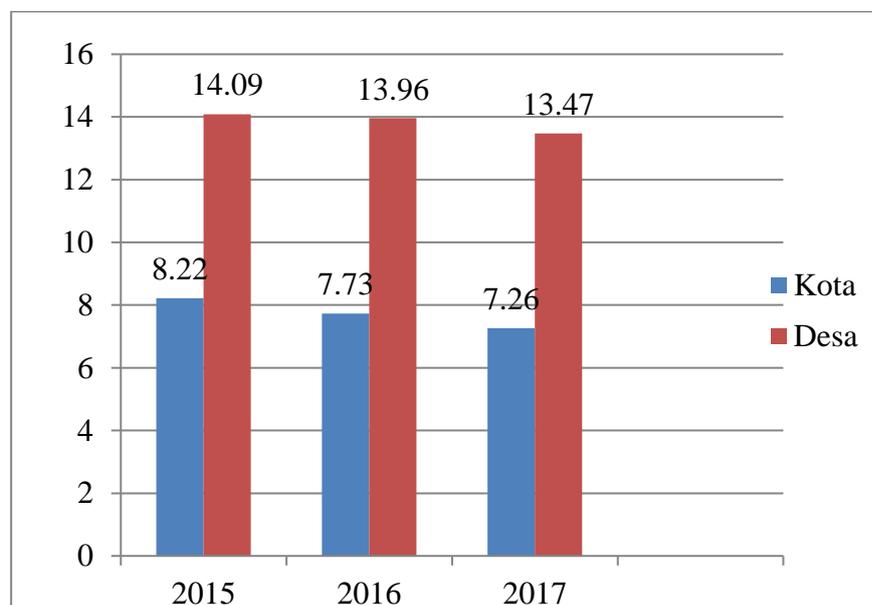
**Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan Indonesia, 2015-2018**

*Sumber: Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2017 dan Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2018 Berita Resmi Statistik. <https://bps.go.id>.*

Pada September 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,79 atau memburuk, dibandingkan September 2016 sebesar 1,74. Ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan. Hal tersebut mengindikasikan biaya yang dibutuhkan untuk mengangkat orang dari kemiskinan semakin besar. Begitu juga dengan indeks keparahan kemiskinan yang memburuk dari 0,44 pada September 2016 menjadi 0,46 pada September 2017. Hal tersebut mengindikasikan ketimpangan diantara penduduk semakin melebar, sehingga ketepatan sasaran program-program dalam menjangkau terutama penduduk miskin semakin dibutuhkan.

Berdasarkan data tersebut, angka kemiskinan penduduk pedesaan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan perkotaan. Pada September 2015 persentase

penduduk miskin desa masih mencapai 14,09% sedangkan penduduk miskin perkotaan yang hanya 8,22%, selanjutnya pada September 2016 presentase penduduk miskin kota maupun desa menurun menjadi 7,73% dan 13,96%, lalu pada September 2017 pesentase penduduk miskin pekotaan mencapai 7,26% dan pesentase penduduk miskin pedesaan mencapai 13,47%. Bila melihat data tersebut, presentase penduduk miskin kota maupun desa terus mengalami penurunan akan tetapi presentase penduduk miskin pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan.



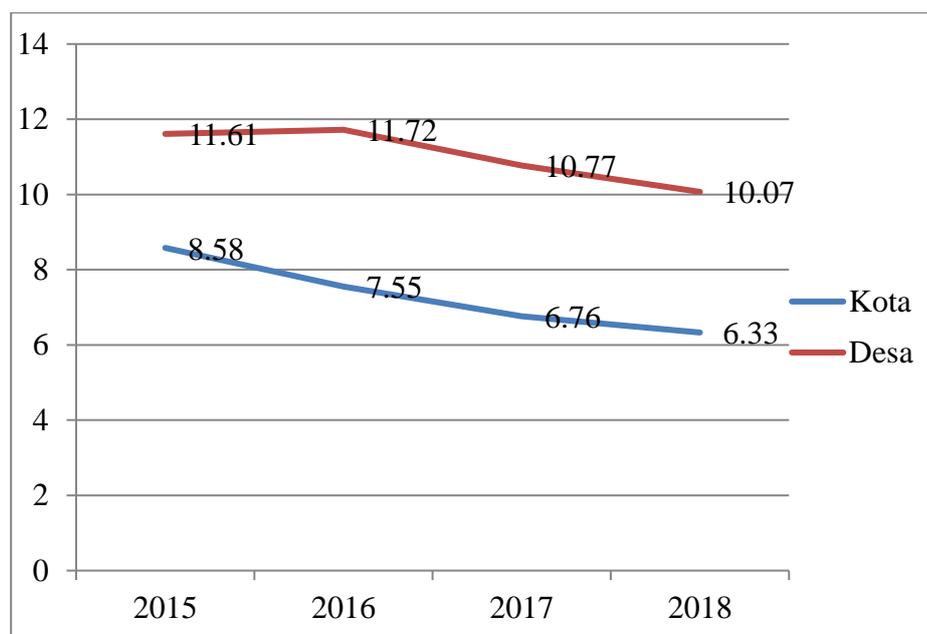
**Gambar 1.2 Presentase Penduduk Miskin Kota dan Desa di Indonesia**

*Sumber: Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2019. <https://bps.go.id>.*

Berdasarkan gambar 1.2 pada tahun 2018 jumlah desa di Indonesia yang tersebar di ke-34 Provinsi yang ada terdapat 74.957 Desa. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa peranan desa dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia sangatlah penting. Desa dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan pertama dalam

program pembangunan di Indonesia, baik yang berbentuk sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.

BPS mencatat persentase kemiskinan penduduk pedesaan di Provinsi Jawa Barat jauh lebih tinggi daripada perkotaan serta tingkat kemiskinan pedesaan di Provinsi Jawa Barat sejak 2015 sampai 2018 berfluktuatif berbeda dengan perkotaan yang tren nya terus menurun.



**Gambar 1.3 Persentase Penduduk Miskin Kota dan Desa di Jawa Barat**

*Sumber: Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2019. <https://bps.go.id>.*

Pada September 2015 persentase penduduk miskin desa mencapai 11,61% sedangkan penduduk miskin perkotaan yang hanya 8,58%, lalu pada September 2016 presentase penduduk miskin desa meningkat sebesar 11,72% dan penduduk miskin perkotaan turun menjadi 7,55%, kemudian pada September 2017 pesentase penduduk miskin perkotaan kembali turun sebesar 6,76% dan pesentase penduduk miskin pedesaan turun menjadi 10,77%, dan pada september 2018 kemiskinan

desa maupun kota mengalami penurunan masing-masing sebesar 10,07% dan 6,33%. Bila melihat data tersebut, penduduk miskin kota maupun desa terus mengalami penurunan akan tetapi presentase penduduk miskin pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Itu artinya konsentrasi mengatasi kemiskinan harus lebih fokus pada wilayah pedesaan.

**Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota**

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Kabupaten Garut	12.81	11.64	11.27	9.27
Kabupaten Ciamis	8.98	8.42	8.20	7.22
Kabupaten Pangandaran	10.76	10.23	10.00	8.12
Kabupaten Tasikmalaya	16.28	15.60	14.80	12.71
Kota Banjar	7.41	7.01	7.06	5.70

Sumber: *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota 2015-2018.* <https://bps.go.id>.

Data pada tabel 1.1 menunjukkan daerah yang masuk ke dalam wilayah Priangan Timur yang merupakan wilayah yang pembangunannya paling tertinggal daripada Kota/Kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat. Dari data tersebut Kota Banjar merupakan Kota yang paling kecil persentase kemiskinannya akan tetapi selama tahun 2015 sampai tahun 2017 persentase kemiskinan di Kota Banjar berhenti di angka 7%, selain itu persentase penduduk miskin Kota Banjar juga sempat meningkat pada tahun 2017 sebesar 7,06%, berbeda dengan daerah lain yang persentase kemiskinannya terus menurun dari tahun ke tahun, itu artinya kemiskinan di Kota Banjar berfluktuasi.

Dari persentase kemiskinan di Kota Banjar tersebut ternyata data jumlah penduduk miskin tidak akurat, dimana jumlah individual yang tercatat hasil

pendataan dari BPS dengan kenyataan lapangan berbeda. Terdapat 16 Desa dengan jumlah penduduk miskin sebesar 63.410 jiwa di tahun 2016 dan pada tahun 2017 sebesar 62.708 jiwa dari total jumlah penduduk desa sebesar 93.151 jiwa. Selain itu terdapat beberapa desa yang jumlah penduduk miskinnya meningkat dari tahun sebelumnya, hal tersebut mengindikasikan kurangnya penyerapan program pemerintah dalam hal mengurangi angka kemiskinan.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mempunyai Sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu sendiri disebut dengan Nawa Cita. Pembangunan desa merupakan wujud Nawa Cita ke-3 yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan. Direncanakannya program tersebut akibat dari kurang diperhatikannya desa-desa oleh pemerintahan pada masa sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata. Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukan dalam pembangunan infrastruktur dasar yang padat karya dan dana tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Prioritas Dana Desa ialah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yakni program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat. Melalui Dana Desa, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom.

**Tabel 1.2 Anggaran Dana Desa di Kota Banjar**

Tahun	Alokasi Dasar		Alokasi Formula		Jumlah Dana Desa
	Per Desa	Per Kab/Kota	Per Desa	Per Kab/Kota	
2015	351.475.625	5.623.610.000			351.475.625
2016	565.640.000	9.050.240.000	224.392.750	3.590.284.000	790.032.750
2017	720.442.000	11.527.072.000	304.334.688	4.869.355.000	1.024.776.688
2018	616.345.000	9.861.520.000	464.362.000	7.429.792.000	8.046.137.000

*Sumber: Rincian Alokasi Dana Desa Kota Banjar Tahun Anggaran 2015-2018. Pendamping Desa Kecamatan Langensari Kota Banjar.*

Berdasarkan tabel 1.2, anggaran Dana Desa dari tahun 2015 sampai 2018 terus meningkat serta terdapat perubahan anggaran, hal tersebut dikarenakan kebijakan pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa tahun sebelumnya, melalui:

- a. Penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (Alokasi Dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan alokasi formula;
- b. Memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi; dan

- c. Memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah.

Peningkatan anggaran yang besar tersebut seharusnya diiringi dengan penurunan jumlah penduduk miskin karena fokus Dana Desa ini untuk pembangunan infrastruktur pedesaan, dengan dibangunnya infrastruktur desa seperti akses jalan, irigasi, jembatan, posyandu dan PAUD maka diharapkan kegiatan perekonomian warga dibidang pertanian, perdagangan maupun pendidikan, dan kesehatan semakin berjalan lancar.

Selain itu fokus Dana Desa juga untuk pemberdayaan masyarakat desa, Pemberdayaan masyarakat dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa serta Badan Usaha Milik Desa atau lebih kita kenal dengan BUMDES, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan. Selain itu pelatihan dan pembinaan masyarakat juga dimaksudkan agar masyarakat mampu menggali potensi wilayahnya guna menciptakan lapangan usaha dilingkungan sekitar tanpa harus mencari pekerjaan di kota.

Realisasi pembangunan maupun pemberdayaan setiap desa berbeda-beda karena disesuaikan dengan keadaan wilayah dan harus bertumpu pada aspirasi masyarakatnya, karena masyarakat desa merupakan sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Namun apabila melihat data persentase penduduk

miskin Kota Banjar juga sempat meningkat pada tahun 2017 sebesar 7,06%, hal tersebut mengindikasikan kurangnya penyerapan program pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat secara terperinci pada tabel 1.3.

**Tabel 1.3 Realisasi Dana Desa di Kota Banjar**

Desa	Dana Desa untuk Pembangunan Desa		Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	2017	2018	2017	2018
Balokang	860.811.000	918.600.000	163.965.000	162.107.000
Cibeureum	891.555.000	929.408.000	133.221.000	151.299.000
Neglasari	901.802.000	938.505.000	122.974.000	142.202.000
Jajawar	871.059.000	921.455.000	153.717.000	159.252.000
Raharja	881.307.000	920.210.000	143.469.000	160.497.000
Mekarharja	922.298.000	941.829.000	102.478.000	138.878.000
Mulyasari	865.740.000	918.600.000	159.036.000	162.106.000
Binangun	912.050.000	951.022.000	112.726.000	129.685.000
Sukamukti	881.043.000	922.458.000	143.733.000	158.249.000
Batulawang	891.558.000	940.210.000	133.218.000	140.497.000
Karyamukti	900.703.000	931.276.000	124.073.000	149.431.000
Sinartanjung	934.268.000	961.820.000	90.508.000	118.887.000
Kujangsari	911.070.000	940.215.000	113.706.000	140.492.000
Waringinsari	850.564.000	907.793.000	174.212.000	172.914.000
Langensari	879.459.000	902.760.000	145.317.000	177.947.000
Rejasari	903.411.000	928.440.000	121.365.000	152.267.000

*Sumber: Detail Kegiatan Sarana dan Non Prasarana Dana Desa Tahun Anggaran 2017-2018 Pendampingan Desa Kecamatan Langensari Kota Banjar.*

Kementerian keuangan mengklaim program Dana Desa yang dimulai sejak tahun 2015 dapat menyerap 11 juta lebih tenaga kerja. Jumlah serapan ini berasal dari Dana Desa sebesar Rp.280 juta untuk setiap Desa, dengan jumlah Desa penerima sebanyak 74.093 Desa. Direktur Jendral Perimbangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo pada tanggal 16/11/2015 menyatakan bahwa “logikanya dari Rp. 280 juta untuk setiap Desa, dan setiap pekerjaan taruhlah masanya 10 hari masa kerja dengan jumlah Desa 74.000 itu besar sekali lapangan

kerja baru yang tercipta” lanjutnya lagi “itu jelas bisa mengurangi kemiskinan secara signifikan. Setiap tenaga kerja yang mengerjakan sarana prasarana Desa dibayar Rp. 75000/hari, maka dia kerja selama 10 hari satu orang dapat Rp.750000”.

Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah daerah melalui anggaran belanja daerah kepada desa, dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakatnya, karena masyarakat desa merupakan sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal maka tujuan dari pemerintah pusat untuk pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil dapat terwujud. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit.

Desa-desa yang ada di Kota Banjar berpotensi maju perekonomiannya khususnya pada sektor pertanian karena sebagian besar penduduknya masih menggantungkan penghidupannya di sektor tersebut. Selain itu Berkaitan dengan hal tersebut seharusnya didukung oleh program-program dari pemerintah yang tentunya memanfaatkan Dana Desa yang besar dan juga digunakan untuk membangun infrastruktur yang mendorong majunya perekonomian serta pemberdayaan masyarakat desa guna menurunkan jumlah penduduk miskin di seluruh desa yang ada di kota Banjar.

Penelitian ini akan menganalisis realisasi Dana Desa terhadap jumlah penduduk miskin desa yang ada di kota Banjar. Analisis difokuskan pada

anggaran Dana Desa yang digunakan untuk Pembangunan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa terhadap Kemiskinan. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian 16 desa di kota Banjar yang mendapatkan tambahan pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan dana transfer yaitu Dana Desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran mengenai alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan (Studi Kasus pada 16 Desa di Kota Banjar Periode 2015-2018)”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa secara parsial terhadap Kemiskinan di Kota Banjar Tahun 2015-2018 secara?
2. Bagaimana pengaruh Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa secara bersama-sama terhadap Kemiskinan di Kota Banjar Tahun 2015-2018?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang penulis paparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa secara parsial terhadap Kemiskinan Tahun 2015-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa secara bersama-sama terhadap Kemiskinan Tahun 2015-2018.

#### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk:

1. Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan analisis Kebijakan Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintah yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam penerapan Dana Desa. Masalah tersebut memicu permintaan terhadap peneliti untuk menjelaskan fenomena yang terjadi.

2. Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai Kebijakan Dana Desa yang di laksanakan oleh pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa guna menekan jumlah penduduk miskin di desa.

3. Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Desa, Kabupaten/Kota dan Pemerintah pusat untuk meningkatkan kinerjanya.

## 1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Banjar. dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian pada data sekunder yaitu berupa data kemiskinan menurut desa yang bersumber dari Program Nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan Realisasi Dana Desa yang bersumber dari Pendamping Desa.

### 1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian diawali sejak bulan September 2019 dan diselesaikan pada bulan Januari 2020. Adapun kegiatan penelitian ini diawali dengan pengajuan judul kepada pihak Jurusan Ekonomi Pembangunan, dilanjutkan dengan pengumpulan data kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, selanjutnya dilakukan penyusunan usulan penelitian, seminar usulan penelitian, revisi usulan penelitian, pengolahan data serta penyusunan penulisan skripsi, diakhiri dengan ujian skripsi dan komprehensif. Adapun rincian kegiatan penulisan dipaparkan pada tabel 1.4 sebagai berikut:

**Tabel 1.4 Jadwal Kegiatan Penelitian**

Keterangan	Tahun 2019																Tahun 2020			
	September				Oktober				November				Desember				Januari			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■																			
Pengumpulan Data		■	■																	
Penyusunan UP				■	■	■	■	■												
Seminar Usulan Penelitian										■	■									
Revisi Usulan Penelitian												■	■							

